



# Pj Bupati Cairkan TPP Akhir Bulan

■ Sekda Yusran: Sempat Jadi Temuan BPK  
 ■ Tambahan Penghasilan Pernah Naik 5 Kali



**Namun kami mohon ASN juga harus memberikan kontribusi dan menjalankan kewajibannya kepada pemerintah daerah ini**

**Sy Kamaruzaman**  
 Penjabat (Pj) Bupati Kubu Raya

**KUBU RAYA, TRIBUN** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya akan segera merealisasikan pencairan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. TPP November 2023 hingga Februari 2024 itu akan dicairkan pada 29 Februari mendatang.

Hal ini disampaikan Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman saat memimpin apel gabungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab Kubu Raya di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (26/2).

"Begitu pula dengan gaji tenaga honorer juga akan kita bayarkan," tandas Sy Kamaruzaman di hadapan

peserta apel gabungan. Ia memastikan akan berupaya mempercepat pencairan TPP dan gaji tenaga honorer dan tetap melihat kondisi keuangan daerah. Termasuk membuat berbagai strategi dan formulasi untuk mengatasi hal tersebut. "Semoga ini bisa terealisasi dengan cepat," kata dia.

Ia menjelaskan, ada empat strategi untuk percepatan pembayaran TPP bagi para ASN, Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) serta Uang Persediaan (UP) di Kabupaten Kubu Raya.

Adapun langkah pertama, yakni pembayaran TPP untuk bulan November dan Desember tahun 2023, mulai dari Pejabat Eselon 2 sampai dengan staf segera

diusulkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 Februari 2024 untuk dilakukan verifikasi pembayaran terhadap TPP dua bulan tersebut.

"Untuk tahun 2024, mengingat Februari belum berakhir maka hanya dapat dibayarkan pada TPP bulan Januari 2024. Pembayaran TPP tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji PNS bulan Maret 2024," jelasnya.

Langkah percepatan kedua, untuk belanja Honorarium Non PNSD pada bulan Januari, seluruh OPD dapat diajukan pada tanggal 27 Februari 2024 ke BPKAD dan akan direalisasikan pada 29 Februari ini.

"Sedangkan pembayaran untuk bulan Februari 2024 dapat dilakukan setelah berakhirnya bulan Februari atau minggu pertama Maret 2024," kata Kamaruzaman.

Ketiga, untuk memperlancar realisasi anggaran 2024 sesuai dengan program dan anggaran yang telah dialokasikan pada APBD 2024, agar segera diusulkan Uang Persediaan (UP) ke BPKAD sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

"(Keempat), dimintakan kepada BPKAD agar melaksanakan lembur untuk memperlancar proses verifikasi atas usulan OPD dan untuk OPD untuk menindaklanjuti usulan tersebut, agar tahapan percepatan pencairan dapat dilakukan," jelasnya.

"Sehingga hak pegawai dan target realisasi anggaran dapat dicapai pada triwulan 1 ini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan," lanjutnya.

Untuk itu, Pj Bupati meminta kepada seluruh ASN khususnya kepala perangkat daerah untuk segera menginput data terkait pencairan tersebut ke dalam sistem mulai 27 Februari 2024.

"Karena nanti dalam proses penyediaan uang muka kerja ini berdasarkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang masuk, sehingga akan

terus kita gulirkan," kata dia.

Syarif Kamaruzaman menyatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus memberikan atensi kepada seluruh ASN terhadap hak-hak yang akan diterima.

"Namun kami mohon ASN juga harus memberikan kontribusi dan menjalankan kewajibannya kepada pemerintah daerah ini," tuturnya.

Selain itu, Kamaruzaman juga berharap agar seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus bersinergi membangun

Kubu Raya menjadi jauh lebih baik.

"Mari kita bersama-sama melakukan kegiatan yang bersifat konstruktif untuk membangun Kabupaten Kubu Raya," tutupnya.





### Temuan BPK

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam membenarkan bahwa memang terdapat total sekitar Rp 30 miliar TPP ASN yang belum dibayarkan sejak November 2023 hingga Januari 2024.

Sekda Yusran menjelaskan, adapun penyebab TPP ASN belum dibayarkan selama 4 bulan tersebut dikarenakan dua hal, pertama yakni regulasi berupa Perbup TPP yang harus direvisi kembali, serta terjadinya masalah ekuitas pada kas daerah.

Yusran mengatakan, TPP ASN yang telah dicairkan sebelumnya ternyata menjadi temuan BPK RI di bulan Oktober 2023. Hal itu dikarenakan Peraturan Bupati (Perbup) Kubu Raya tentang TPP yang dinilai perhitungan nilai untuk pejabat yang tidak sesuai dengan aturan kemandagri.

"Sehingga di bulan November kita belum bisa melakukan pembayaran TPP, karena harus memperbaiki perbup yang prosesnya panjang. Harus evaluasi ke provinsi dan kementerian. Tapi perbup itu sekarang sudah selesai di awal Februari," jelas Sekda Yusran.

Lanjutnya, penyebab kedua yakni persoalan ekuitas pada kas daerah, sehingga mengakibatkan kondisi keuangan terjadi kekurangan.

Yusran menyebutkan, masalah ekuitas ini diakibatkan beberapa sumber pendapatan daerah yang belum masuk ke kas di tahun 2023.

"Sehingga ekuitas kas daerah terganggu. Kondisi ini berdampak terhadap TPP ASN yang belum terbayarkan. Namun, di bulan Januari 2024 secara perlahan sumber pendapatan sudah masuk, ada yang masuk ke kas daerah," ujarnya.

Yusran turut menjelaskan, bahwa tiap-tiap ASN memiliki nilai TPP yang bervariasi, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 15 juta per bulan, dari mulai staf, eselon IV, eselon III hingga eselon II yang jumlahnya diperkirakan ribuan orang.

"Ini kita sudah infokan ke perangkat daerah untuk mengajukan permohonan pencairan TPP," katanya.

Yusran pun memastikan, bahwa TPP ASN Kubu Raya tersebut akan dibayarkan, namun secara bertahap seperti bulan November dulu. Tahap pertama untuk level staf dan eselon IV. Sedangkan level eselon III dan II mulai dicairkan setelah kas sudah siap.

Atas kondisi keuangan daerah tersebut, Yusran pun berharap agar ASN dapat berharap agar ASN dapat berharap menunggu proses pencairan. Apalagi ia memastikan, tidak akan ada uang yang berkurang atau pemotongan sepeser pun.

"Namun saya yakin kinerja teman-teman pegawai masih tetap semangat, karena sudah terbukti kita pernah mengalami masa krisis saat covid. Kalaupun ada satu atau dua orang yang protes saya memahami dan maklumi," pungkasnya.

### Naik Lima Kali

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kabupaten Kubu Raya sejak dilantik Muda Mahendrawan sebagai Bupati Kubu Raya periode tahun 2009-2014 sampai dengan periode 2019-2024 mengalami kenaikan hingga lima kali.

Kebijakan tersebut dilakukan atas dasar empati dan simpati yang dirasakan Muda terhadap para ASN yang ada di dalam jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

Pada periode pertama kepemimpinannya sebagai Bupati Kubu Raya, Muda mengesahkan Peraturan Bupati

(Perbub) No 37 tahun 2010 yang berisikan aturan untuk memberikan apresiasi terhadap ASN yang memiliki prestasi dalam bentuk TPP berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dulu itu, pertama kali saya membuat Perbub Tahun 2010, jadi ASN yang punya prestasi kami beri TPP, dari mulai staff golongan 1 dan 2, staff golongan 3 dan 4, eselon 4 (kecamatan, Satpol PP), eselon 4 (setda, set DPRD, dinas), eselon 3b, dan eselon 3a," ucap Muda Mahendrawan di kediamannya, Sabtu kemarin.

Pada masa kepemimpinannya periode 2009 - 2014, Muda menaikkan nominal TPP ASN Kabupaten Kubu Raya hingga dua kali, tertuang pada Perbub No 11 Tahun 2013 dan Perbup No 32 Tahun 2014. Sedangkan di periode 2019 - 2024 sebanyak tiga kali kenaikan nominal TPP, yang tertuang pada Perbup No 56 Tahun 2019, Perbub No 79 Tahun 2022, dan Perbup No 54 Tahun 2023.

Kenaikan TPP ASN itu, tergantung dari PAD, ketika PAD mengalami peningkatan tiap tahunnya maka nominal TPP ASN juga naik.

Namun pada November 2023 sampai dengan Februari 2024 realisasi TPP ASN mengalami masalah, yang mengakibatkan pemberian TPP ASN tertunda karena masih ada revisi Perbup yang harus dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Dana untuk pemberian TPP itu sebenarnya ada, tetapi waktu itu ada revisi Perbub, jadi saya instruksikan kepada Tim untuk lebih mendahulukan yang lebih prioritas, bukan berarti TPP ini tidak menjadi prioritas saya, tetapi ada yang harus didahulukan, lagipula TPP inikan sifatnya apresiasi yang diberikan, bukan hak karena yang menjadi Hak ASN itu adalah gaji," jelas Bupati Kabupaten Kubu Raya periode 2019-2024.

Dikatakannya lagi, realisasi TPP ASN akan tetap diberikan kepada seluruh OPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, bahkan sebelum menyelesaikan jabatannya. Dia memastikan untuk seluruh OPD pada Maret 2024 sudah selesai pemberian TPP ASN yang tertunda dari bulan November 2023. (hdi)